



2017-2022

RENCANA STRATEGIS BPKAD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA CIMAHI
KOTA CIMAHI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menimbang pesatnya perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, maka sudah seharusnya pemerintah memperbaiki cara kerja dalam memberikan hasil yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dimulai dari proses penentuan rencana-rencana yang baik yang bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi memerlukan kemampuan untuk melaksanakan, mengharmonisasikan, dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi tahun 2012-2017, sumber daya dan potensi yang dimiliki serta isu-isu strategis yang berkembang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi merupakan sebuah SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Cimahi, untuk itu harus menetapkan Visi dan Misi SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017-2022 serta menunjang kepada tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana strategis tersebut

merupakan sebuah instrumen/dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai acuan kerja SKPD agar lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Mengingat pentingnya peranan renstra SKPD bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai urusan penunjang di bidang keuangan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu (2017-2022), maka disusunlah Renstra SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

1.2. Maksud dan Tujuan

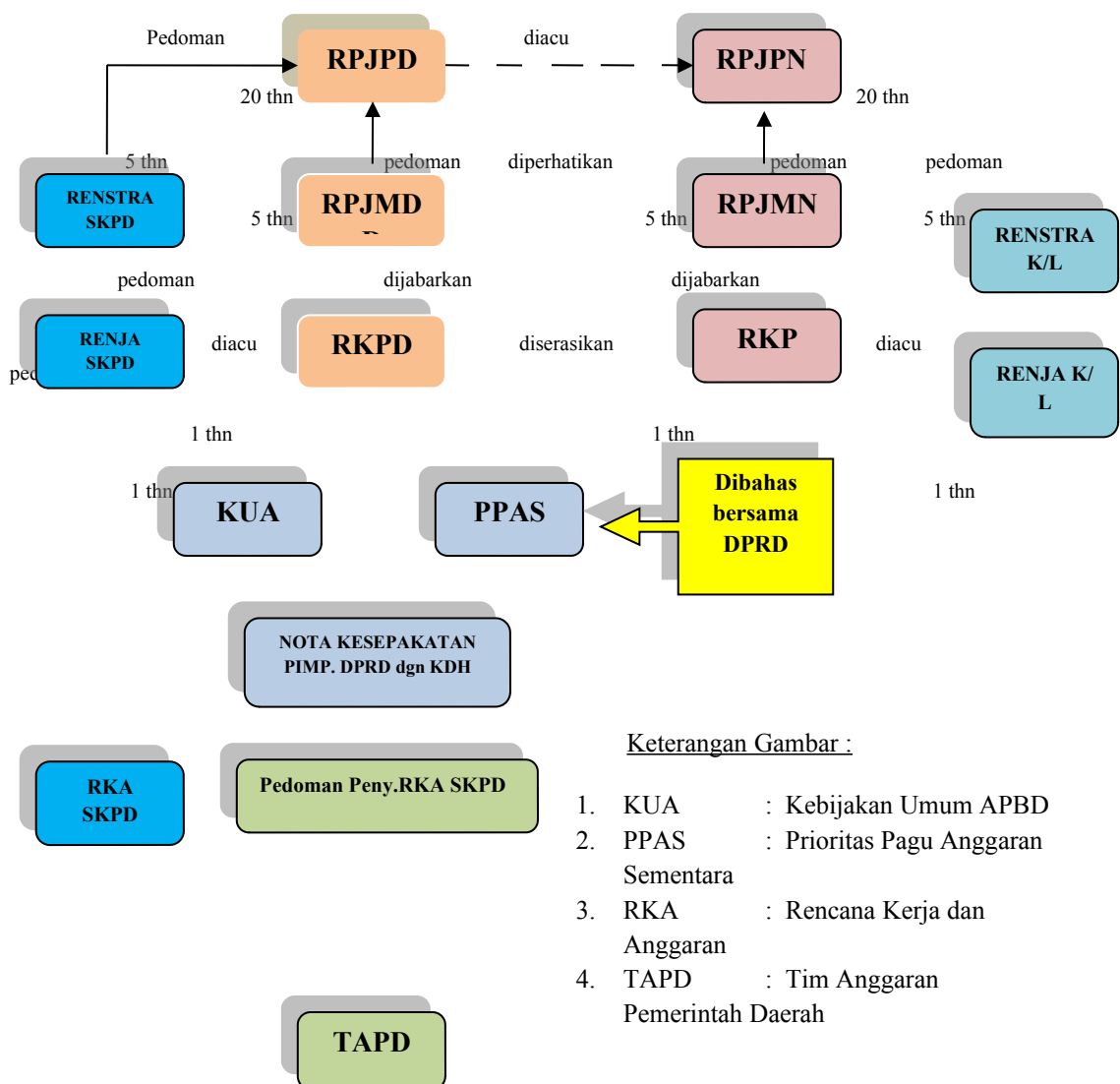
Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai dokumen perencanaan pengelolaan belanja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan acuan / pedoman dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Cimahi dari tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Cimahi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

Dalam proses penyusunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam kurun waktu Tahun 2005-2025 dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Cimahi, selai itu juga dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2018. Berikut ini digambarkan bagaimana hubungan antara RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya :

Gambar 1.1 Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan



1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi 2005-2025; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
- m. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi 2017-2022; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 228 Tahun 2018);
- n. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

Kedudukan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaan daerah merupakan suatu bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahi meliputi belanja dan pengelolaan aset daerah untuk mensinergiskan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJP, RPJMD, RKPD, RTRW dan Renstra SKPD yang ditetapkan dalam Perda Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Peranan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaan daerah menunjang teroptimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung tercapainya indikator kunci pemerintah kota di bidang keuangan daerah yang diantaranya sebagai berikut :

1. Opini BPK
2. Presentase SILPA
3. Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Serta mendukung terciptanya optimalisasi aset daerah seperti rekomendasi yang tergambar dalam kondisi keuangan daerah pada Bab II dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen rencana strategis BPKAD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata

cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3 PERMASALAHAN Dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Cimahi

6.2. Program dan kegiatan lintas SKPD

6.3. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Bab 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab 8 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, menjelaskan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- BPKAD mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang Daerah kota.

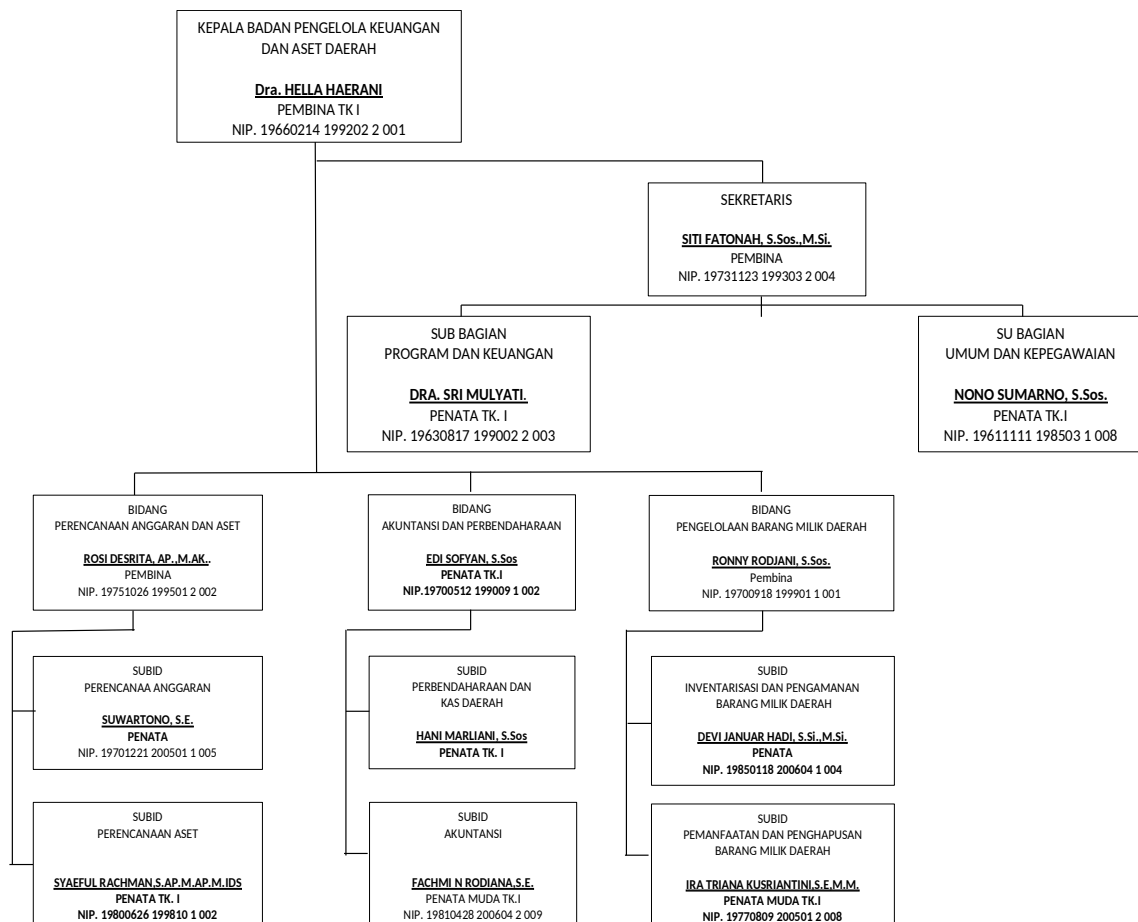
Sementara itu fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu dijelaskan kembali tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktural dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi BPKAD Kota Cimahi Tahun 2017



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

1.	Pegawai PNS	:	40 orang
2.	Pegawai THL	:	6 orang
	Jumlah Pegawai		46 orang

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Cimahi 2017

Laki-laki : 26 orang

Perempuan : 20 orang

Adapun Rincian Pegawai PNS di Lingkungan BPKAD antara lain :

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV B	1 orang
2	IV A	3 orang
3	III D	6 orang
4	III C	4 orang
5	III B	12 orang
6	III A	8 orang
7	II D	3 orang
8	II C	3 orang
	Total Jumlah PNS	40 orang

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Cimahi 2017

Latar belakang pendidikan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2017:

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah Orang
1.	Magister (S2)	Magister Akuntansi	5 orang
		Magister Sains	2 orang
		Magister Administrasi Publik	1 orang
		Magister Teknik	1 orang
2.	Sarjana (S1)	Ekonomi Akuntansi	4 Orang
		Ekonomi Manajemen	6 orang
		Sosial	6 Orang

		Administrasi Negara	1 Orang
		Administrasi Bisnis	1 Orang
		Sarjana Ilmu Komunikasi	1 Orang
3.	Diploma 3 (DIII)	Akuntansi	2 orang
		Perpajakan	1 orang
		Ilmu Pemerintahan	1 orang
		Teknik Komputer	2 orang
4.	SMA	Sosial	3 orang
5.	SMK	Teknik	1 orang
JUMLAH			40 orang

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Cimahi 2017

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKAD Kota Cimahi dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Kendaraan Roda 4	7
2	Kendaraan Roda 2	19
1	Komputer	55
2	Scanner	2
3	Printer	28
4	AC	8
5	Lemari Besi	20
6	Lemari Kayu	6
7	Filling Cab	12
8	Kursi Dankha	77
9	Kursi Putar	6
10	Chitose	30
11	Meja	45
12	CCTV	4
13	Whiteboard Elektrik	1
14	Printonik	1
15	Brankas	3

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran (SIPKD) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- b. Pelaksanaan Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- c. Penatausahaan dan Pelaporan Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Cimahi yaitu Bank BJB Cabang Cimahi. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi komputer SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga diberi amanah untuk mengelola seluruh aset daerah di Kota Cimahi. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset dan kedepan akan dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi geografis manajemen aset (SIG-AsetCimahi). Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.

Badan pengelola keuangan dan aset daerah berdiri pada Tanggal 31 Desember Tahun 2015, sebagai penggabungan antara bagian keuangan dan bagian perlengkapan yang berada dibawah Sekretariat Daerah. Dengan demikian kinerja pelayanan BPKAD dapat dilihat dari dua sisi pada saat tiga tahun pertama sebagai bagian keuangan dan aset daerah serta sisa dua tahun terakhir sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tergambar kedalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
KOTA CIMAHI

No	SASARAN 5 TAHUN SEBELUMNYA (JIKA ADA REVISI MAKA DIHITUNG BERDASARKAN SEMULA DENGAN INDIKATOR SEMULA DAN SESUDAH DENGAN INDIKATOR SESUDAH.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SUMBER DARI INDIKATOR SASARAN) JIKA LEBIH DARI SATU INDIKATOR MAKA DIAGREGATKAN	Program/ kegiatan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kualitas administrasi kesekretariatan	Jumlah orang aparatur pengelola keuangan yang mengikuti pendidikan /pelatih	1. pening katan sumbe rdaya aspara tur								3 angkat an , 45 Orang					3 angka tan , 45 Orang (100%)					100 %
			2.peny usunan							I kali					1 kali (100%					100 %	

			laporan capaian keuangan dan ikhtisar realisasi keuangan												)							
		Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar oprasional	1. pengadaan kendaraan dinas / oprasional						1 jeep, 9 unit motor	4 jeep, 2 pick up, 1mpv				1 jeep, 9 unit motor (100%)	jeep, 2 pick up, 1mpv (100%)					96,8 %	94,4 %	
			2. pengadaan mebel eur						2 paket , 10 meja, 20 kursi	2 paket, 10 meja, 20 kursi				2 paket , 10 meja, 20 kurs (100%)	2 paket, 10 meja, 20 kursi (100%)					100 %	100 %	
			3. pengadaan sarana dan Prasarana						5 rak ,5 gudang	5, gudang				5 rak ,5 gudang (100%)	5, gudang (100%)					100 %	100 %	

			pendu kung pemer intahan																			
			4. pening katan sarana dan prasar ana aspara tur						10 komp uter, 5 laptop , 10, 2 LCD Big, 1 papan tulis elektri k, 1 mesin fotoco py, 1 unit kulkas	5 komp uter, 1 LCD big ,				10 komp uter, 5 lapto p, 10, 2 LCD Big, 1 papan tulis elektr ik, 1 mesin fotoc opy, 1 unit kulkas (100%)	5 komp uter, 1 LCD big , (100%)					100 %	100 %	
			5. Pemeli haraan rutin/ berkala kendar aan dinas/ oprasio nal						8 unit kenda raan roda 4, 9 unit kenda raan	8 unit kenda raan roda 4, 9 unit kenda raan				15 unit kenda raan (80%)	8 unit kenda raan roda 4, 9 unit kenda raan (100%)					100 %	100 %	
			6. pemeli						1 gedun					1 gedun							100 %	100 %

			haraan rutin/ berkala perlen gkapan gedung						g					g (100%)						
			7. Pemeli haraan rutin / berkala mebeu leur						3 jenis	3 jenis				3 jenis (100%)	3 jenis (100%)				100 %	100 %
			8. Pemeli haraan rutin/ berkala peralat an dan perlen gkapan kantor						18 unit, 10 jenis	28 unit, 5 jenis				18 unit, 10 jenis (100%)	28 unit, 5 jenis (100%)				100 %	100 %
			9. penyed ia jasa komun ikasi , sumbe r daya air dan listrik						1 langga nan telepo n, 1 langga nan intern et, 2 rekeni	1 langga nan telepo n, 1 langga nan intern et, 2 rekeni				2 (67%)	1 langga nan telepo n, 1 langga nan intern et, 2 rekeni				100 %	100 %

									ng	ng					ng (100%)					
			10. penyed ia jasa jamina n barang milik daerah						17 polis asura nsi kenda raan	17 polis asuran si kenda raan				17 polis asura nsi kenda raan (100%)	17 polis asura nsi kenda raan (100%)				100 %	100 %
			11. Penyed ia jasa pemeli haraan dan perizin an, kendar aan dinas/ oprasio nal						8 stnk roda 4, 9 stnk roda 2	8 stnk roda 4, 9 stnk roda 2				8 stnk roda 4, 9 stnk roda 2 (100%)	8 stnk roda 4, 9 stnk roda 2 (100%)				100 %	100 %
			11. Penyed iaan jasa admini strasi keuang							2 doku men					2 doku men (100%)				100 %	100 %

			an																	
			12. penyed ia alat tulis kantor						85 jenis ATK	85 Jenis ATK				80 Jenis ATK (100%)	85 Jenis ATK (100%)				100 %	100 %
			13. Penyed iaan barang cetaka n dan pengga ndaan						7 jenis, 4 buku	7 jenis				10 (95%)	7 jenis (100%)				100 %	100 %
			14. penyed iaan bahan bacaan dan peratu ran perund ang- undan gan						3 media cetak, 10 buku perat uran	3 media cetak, 10 buku peratu ran				3 media cetak, 10 buku perat uran (100%)	3 media cetak, 10 buku perat uran (100%)				100 %	100 %
			15. penyed iaan barang logistik kantor						12 jenis perala tan	12 jenis perala tan				12 jenis perala tan (100%)	12 jenis perala tan (100%)				100 %	100 %

			16. penyed iaan makan an dan minum an							600 orang	1000 orang					600 orang (100%)	1000 orang (100%)				100 %	100 %
			17. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							50 kali luar daerah, 20 kali dalam daerah	50 kali luar daerah, 20 kali dalam daerah					50 kali luar daerah, 20 kali dalam daerah (100%)	50 kali luar daerah, 20 kali dalam daerah (100%)				100 %	100 %
			18. Penyed iaan jasa Tenaga pendukung Administrasi Teknis dan perkantoran							5 orang THL	4 orang THL					5 orang THL (100%)	4 orang THL (100%)				100 %	100 %

2.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Pernebitan SP2D	1. Kegiatan peningkatan pelayanan penatausahaan dan pemberdayaan							12 kali, 5500 buah SPP, SPM, SP 2D, 500 Pegawai 1 paket					12 kali, 5500 buah SPP, SPM, SP 2D, 500 Pegawai 1 paket(100%)					100 %
		Jumlah SKPD Menyusun RKA/RKPA	1. Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD						3 jenis dokumen, 200 buah 1 sosialisasi 4, tahapan,	3 jenis dokumen, 200 buah 1 sosialisasi 4, tahapan				3 jenis dokumen, 200 buah 1 sosialisasi 4, tahapan (100%)	3 jenis dokumen, 200 buah 1 sosialisasi 4, tahapan (100%)				100 %	100 %
			2. Penyusunan Rancangan KHD tentang						1 jenis 150 buah	1 jenis 150 buah				1 jenis 150 buah (100%)	1 jenis 150 buah (100%)					

			Penjab aran APBD																			
			3. Penyus unan Rancan gan Perda Tentan g peruba han APBD						3 jenis doku men, 400 buah 1 sosiali sasi 4 tahap an	3 jenis doku men, 400 buah 1 sosiali sasi 4 tahap an				3 jenis doku men, 400 buah 1 sosiali sasi 4 tahap an (100%)	3 jenis doku men, 400 buah 1 sosiali sasi 4 tahap an (100%)					100 %	100 %	
			4. Penyus unan rancan gan Peratu ran KHD tentan g Penjab aran Peruba han APBD						2 jenis doku men 350 buah	2 jenis doku men 350 buah				2 jenis doku men 350 buah (100%)	2 jenis doku men 350 buah (100%)					100 %	100 %	
		Jumlah Penerbitan SPD	1. Pengen						3 jenis lapora	3 jenis lapora				3 jenis	3 jenis lapora					100 %	100 %	

		Tepat Waktu	dalian Anggar an						n 30 buku	n 30 buku				lapor an 30 buku (100%)	n 30 buku (100%)					
		Pengumpulan Bahan dan Data kebutuhan penyusunan laporan tepat waktu	1. Penyus unan lapora n keuang an semen tara						1 jenis lapora n 50 buah	1 jenis lapora n 100 buah				1 jenis lapor an 50 buah (100%)	1 jenis lapora n 100 buah (100%)				!	100 %
		Jumlah SKPD Menyampaikan laporan keuangan	1. Penyus unan pelapo ran keuang an akhir tahun						3 jenis lapora n 350 buah 2x bimte k	2 jenis lapora n 200 buah				3 jenis lapor an 350 buah 2x bimte k (100%)	2 jenis lapora n 200 buah (100%)				100 %	100 %
		Penyampaian bahan dan data penyusunan Perda Pertanggungjawa ban APBD	1. Penyus unan rancan gan peratu ran						2 jenis lapora n, 400 buah	3 jenis lapora n, 700 buah				2 jenis lapor an, 400 buah (100%)	3 jenis lapora n, 700 buah (100%)				100 %	100 %

			daerah tentan g pertan ggungj awaba n pelaks anaan APBD												)							
			2. Penyus unan rancan gan penjab aran peratu ran daerah tentan g penjab aran pertan ggungj awaba n pelaks anaan APBD						1 jenis lapora n 300 buah	1 jenis lapora n, 300 buah					1 jenis lapor an 300 buah (100%)	1 jenis lapora n, 300 buah (100%)					100 %	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan keuangan daerah	1. Penyus unan standar						1 jenis doku men 150	1 jenis doku men 150					1 jenis doku men	1 jenis doku men 150					40%	100 %

	Keuangan Daerah		satuan harga							buah	buah				150 buah (100%)	buah (100%)					
			2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah								1 jenis 150 buah					1 jenis 150 buah (100%)				100 %	100 %
			3. Peningkatan manajemen investasi daerah							1 jenis						(0%)				100 %	100 %
			4. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah								1 kajian 1 aplikasi					1 kajian 1 aplikasi (100%)				100 %	100 %

			5. sinergitas penganggaran dan pelaporan bantuan keuangan							3x sosialisasi	1 dokumen				3x sosialisasi (100%)	1 dokumen (100%)				100 %	100 %
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	--	--	--	-----------------------------	------------------------	--	--	--	----------	----------

4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Aset tanah yang tersertifikasi	1. Pening katan Manaj emen Aset/ Barang daerah							40 sertifi kat 3 paket 1 jenis 100 buku 250 orang	30 sertifik at 3 paket 1 jenis 100 buku				9	3 sertifi kat 3 paket 1 jenis 100 buku (100%)					40%	10%
---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	-----	-----

		Jumlah penghapusan Barang milik daerah	1. Penghapusan Barang Milik Daerah						1 paket	4x penilaian dan penghapusan				1 paket	2x Penilaian 3 x penghapusan (100%)				100 %	50 %
		Jumlah Pemeliharaan Barang milik daerah	1. Pemanfaatan aset Daerah						1 jenis					1 jenis					100 %	
			2. Pemanfaatan Barang milik daerah							1 jenis					1 jenis					100 %
		Jumlah Kendaraan dinas dan oprasional yang masuk masa penyusutan	1. optimasi aset daerah							1 jenis					1 jenis					100 %
5.	Monitoring dan Evaluasi Terukur dan efektif	Persentase Penyerapan DPA	1. sistem informasi Pengelolaan keuangan daerah						2 paket 2 jenis, 200 buah 2 kali 5 orang	2 paket 2 jenis, 200 buah 2 kali 5 orang				174 (80%)	2 paket 2 jenis, 200 buah 2 kali 5 orang				80%	100 %

										5 angka tan ,2 kali	5 angkat an ,2 kali					5 angka tan ,2 kali (100%)						
		Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	1. Penyus unan Lapora n Capaia n kinerja dan ikhtisar realisa si kinerja SKPD							25 jenis, 440 buah	28 jenis, 490 buah				465 (100%)	469 (90%)				100 %	90%	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan

Sekretariat Daerah Kota Cimahi

NO	Indikator Kinerja sesuai Fungsi PD	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
48	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah					1.617.0 13.400	1.025.8 14.000				877.59 3.718	606.69 6.465				54%	59%		
49	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD				244.79 6.800	135.66 9.517	140.76 9.000			241.99 4.950	119.46 0.100	138.81 7.750			99%	88%	99%		
50	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				154.29 5.850	98.664. 000	161.76 8.000			152.75 1.500	91.838. 240	147.94 1.400			99%	93%	91%		
51	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD				38.197. 900	40.140. 000	29.375. 000			37.948. 650	40.140. 000	29.375. 000			99%	100%	100%		
52	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD				70.196. 100	27.720. 000	32.150. 000			68.206. 150	27.571. 852	32.109. 500			97%	99%	100%		
53	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				150.07 2.350	75.308. 400	66.125. 000			148.54 2.535	74.312. 599	66.104. 750			99%	99%	100%		
54	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				432.51 9.000	1.014.6 70.000	1.008.6 69.000			415.88 7.505	990.27 4.110	999.88 4.075			96%	98%	99%		
55	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				130.01 4.000	88.701. 000	69.719. 000			128.19 5.070	87.772. 099	69.487. 250			99%	99%	100%		
56	Pengendalian Anggaran				183.67 6.943	84.388. 750	63.743. 750			178.83 1.050	77.774. 340	55.493. 750			97%	92%	87%		
57	Sinergitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan				14.527. 575	10.380. 200	12.050. 000			12.330. 000	9.977.7 00	10.167. 600			85%	96%	84%		

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

No	URAIAN KEGIATAN	RENCANA 2016-2017						Anggaran	Realisasi
		2016			2017			2017	2017
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.366.977.351	1.163.307.580	85,1	1.012.106.000	897.544.285	88,68	-26%	-23%
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.000.000	13.431.842	37,31	51.800.000	41.500.062	80,11	44%	209%
3	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	60.650.000	40.371.860	66,56	81.500.000	62.724.514	76,96	34%	55%
4	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	231.840.000	143.444.568	61,87	54.400.000	25.743.700	47,32	-77%	-82%
5	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	322.244.234	307.152.352	95,31	47.174.000	46.531.000	98,63	-85%	-85%
6	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	78.401.417	77.300.775	98,59	69.714.000	67.820.660	97,28	-11%	-12%
7	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100.800.000	94.725.600	93,97	76.100.000	74.521.450	97,92	-25%	-21%
8	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000	14.670.000	73,35	12.000.000	10.228.000	85,23	-40%	-30%
9	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	32.625.200	32.169.500	98,6	30.692.000	30.179.650	98,33	-6%	-6%
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	57.087.500	55.350.000	96,95	73.950.000	73.444.574	99,31	30%	33%
11	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	347.241.000	317.653.083	91,47	420.000.000	400.710.675	95,4	21%	26%
12	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI TEKNIS DAN PERKANTORAN	80.088.000	67.038.000	83,7	94.776.000	64.140.000	67,67	18%	-4%
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.714.655.000	1.469.650.034	85,71	3.743.750.000	3.421.364.260	91,38	118%	133%
14	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	409.975.000	370.130.000	90,28	2.310.000.000	2.147.630.000	92,97	463%	480%
15	PENGADAAN MEBELUR	298.700.000	274.743.000	91,97	400.000.000	393.716.800	98,42	34%	43%
16	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	388.400.000	300.120.000	77,27	375.000.000	245.676.250	65,51	-3%	-18%
17	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	230.500.000	225.582.258	97,86	100.000.000	81.342.727	81,34	-57%	-64%
18	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	265.960.000	179.863.201	67,62	480.000.000	474.639.248	98,88	80%	164%
19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.600.000	19.820.000	96,21				-100%	-100%
20	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUR	19.520.000	18.732.275	95,96	11.250.000	10.950.000	97,33	-42%	-42%
21	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	81.000.000	80.659.300	99,57	67.500.000	67.409.235	99,86	-17%	-16%
22	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				19.057.000	14.820.000	77,76		
23	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU				19.057.000	14.820.000	77,76		
24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				200.250.000	173.950.000	86,86		
25	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				200.250.000	173.950.000	86,86		
26	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.184.090.392	1.117.901.095	94,41	297.743.400	248.616.197	83,5	-75%	-78%
27	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	294.220.500	268.521.000	91,26	235.000.000	194.937.497	82,95	-20%	-27%
28	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	17.224.500	17.224.500	100	28.736.700	23.900.000	83,16	67%	39%
29	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	728.345.392	692.655.595	95,09	34.006.700	29.778.700	87,56	-95%	-96%
30	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KEUANGAN DAN IKHTISAR REALISASI KEUANGAN	144.300.000	139.500.000	96,67				-100%	-100%
31	PROGAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	5.104.977.527	4.579.436.304	89,7	6.358.270.732	4.482.934.072	70,5	25%	-2%
32	PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA	110.760.000	109.233.800	98,62	209.415.000	176.833.100	84,44	89%	62%
33	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				538.232.000	134.429.594	24,97		
34	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	464.385.600	378.539.911	81,51	602.686.612	400.197.500	66,4	30%	6%
35	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD	26.325.000	25.265.100	95,97	27.800.000	22.317.500	80,27	6%	-12%
36	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	213.129.000	192.307.250	90,23	433.254.000	315.413.349	72,8	103%	64%
37	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	42.475.000	38.687.500	91,08	52.655.000	40.415.000	76,75	24%	4%
38	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	78.619.000	77.009.550	97,95	479.617.500	404.938.833	84,42	510%	426%
39	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	71.325.000	70.594.350	98,97	71.325.000	71.127.250	99,72	0%	1%
40	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH				319.234.825	220.806.134	69,16		
41	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.906.154.527	1.715.553.943	90	905.275.875	732.439.950	80,9	-53%	-57%
42	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET / BARANG DAERAH	1.610.708.150	1.482.281.500	92,02	1.430.000.000	1.004.311.290	70,23	-11%	-32%
43	PENGENDALIAN ANGGARAN	83.768.750	82.044.100	97,94	72.653.250	57.081.000	78,56	-13%	-30%
44	SINERGITAS PENGANGGARAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN	41.893.000	15.341.950	36,62	15.825.000	11.646.450	73,59	-62%	-24%
45	PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	389.546.100	341.885.850	87,76	597.140.920	427.521.175	71,59	53%	25%
46	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	65.888.400	50.691.500	76,93	100.000.000	64.967.250	64,96	52%	28%
47	PENINGKATAN PELAYANAN PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN				315.080.850	248.786.597	78,95		
48	OPTIMASI ASET DAERAH				88.074.900	77.874.500	88,41		
49	SINERGITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				100.000.000	71.827.600	71,82		

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Keuangan Kota Cimahi

No	URAIAN KEGIATAN	RENCANA 2013-2015									Anggaran			Realisasi		
		2013			2014			2015			2014	2015	Rata-Rata	2014	2015	Rata-Rata
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%						
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.157.385.350	1.148.431.945	99,22	987.956.818	987.301.673	99,93	1.455.231.346	1.025.277.079	71,14	-15%	47%	16%	-14%	5%	-5%
2	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	389.435.000	384.974.100	98,85	427.100.000	390.510.000	91,43	575.308.000	455.040.000	79,09	10%	35%	22%	1%	17%	9%
3	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	191.595.350	187.565.200	97,89	123.222.618	122.887.625	99,72	204.017.586	122.822.368	60,2	-36%	66%	15%	-34%	0%	-17%
4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	159.505.000	159.383.050	99,92	150.280.000	149.039.448	99,18	133.535.000	133.532.150	99,99	-4%	-11%	-8%	-6%	-10%	-8%
5	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR				14.954.200	14.876.100	99,47	14.954.200	14.914.470	99,73	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	53.650.000	53.504.500	99,72	13.350.000	8.655.000	64,83	43.222.500	25.210.250	58,32	-75%	224%	74%	-84%	191%	54%
7	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	363.200.000	363.005.095	99,94	259.070.000	301.333.500	116,3	484.194.060	283.757.841	58,6	-29%	87%	29%	-17%	-6%	-11%
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	176.589.204	172.464.190	97,66	720.584.075	717.072.865	99,51	452.064.257	404.312.272	89,43	308%	-37%	133%	316%	-44%	136%
9	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	138.100.300	134.000.000	97,03	679.570.325	676.190.065	99,5	353.050.507	346.324.672	98,09	392%	-48%	172%	405%	-49%	178%
10	PENJELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.488.904	38.464.190	99,93	41.013.750	40.882.800	99,68	99.013.750	57.987.800	58,56	7%	141%	74%	6%	42%	24%
11	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	432.089.900	417.367.490	96,59	471.263.750	424.926.110	90,16	194.744.000	91.973.750	47,22	9%	-59%	-25%	2%	-78%	-38%
12	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	126.589.900	114.131.490	90,15	97.949.700	86.530.000	88,4	26.750.000	19.575.000	73,17	-31%	-70%	-50%	-24%	-77%	-51%
13	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	305.500.000	303.226.000	99,25	383.314.050	338.376.110	88,27	167.994.000	72.398.750	43,09	25%	-56%	-15%	12%	-79%	-34%
14	PROGAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	1.418.296.518	1.384.687.410	97,63	1.625.641.867	1.519.121.040	93,44	2.506.031.750	1.549.381.075	61,82	15%	54%	34%	10%	2%	6%
15	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	244.796.800	241.994.950	98,85	135.669.517	119.460.100	88,05	224.169.000	138.817.750	61,92	-45%	65%	10%	-51%	16%	-17%
16	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENYAJIAN APBD	38.197.900	37.948.650	99,34	40.140.000	40.140.000	100	48.275.000	29.375.000	60,84	5%	20%	13%	6%	-27%	-11%
17	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	154.295.850	152.751.500	98,99	98.664.000	91.838.240	93,08	203.887.000	147.941.400	72,56	-36%	107%	35%	-40%	61%	11%
18	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENYAJIAN PERUBAHAN APBD	70.196.100	68.206.150	97,16	27.720.000	27.571.852	99,46	38.775.000	32.109.500	82,8	-61%	40%	-10%	-60%	16%	-22%
19	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	130.014.000	128.195.070	98,6	88.701.000	87.772.099	98,95	118.719.000	69.487.250	58,53	-32%	34%	1%	-32%	-21%	-26%
20	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENYAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD			96,15	75.308.400	74.312.599	98,67	115.125.000	66.104.750	57,41		53%	28%		-11%	-6%
21	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	432.519.000	415.887.505	97,36	1.064.670.000	990.274.110	93,01	1.681.288.000	999.884.075	59,47	146%	58%	102%	138%	1%	70%
22	PENGENDALIAN ANGGARAN	183.676.943	178.831.050	84,87	84.388.750	77.774.340	92,16	63.743.750	55.493.750	87,05	-54%	-24%	-39%	-57%	-29%	-43%
23	SINERGIITAS PENGANGGARAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN	14.527.575	12.330.000	60,85	10.380.200	9.977.700	96,12	12.050.000	10.167.800	84,37	-29%	16%	-6%	-19%	2%	-9%

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Perlengkapan
Kota Cimahi**

No	URAIAN KEGIATAN	RENCANA 2013-2015									Anggaran			Realisasi		
		2013			2014			2015			2014	2015	Rata-Rata	2014	2015	Rata-Rata
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%						
1	PROGAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PEMBANGKAIAN KEUANGAN DAERAH	1.243.545.500	756.795.110	60,85	1.243.545.500	756.795.110	60,85	1.025.814.000	597.283.545	58,23	0%	-18%	-9%	0%	-21%	-11%
2	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET / BARANG DAERAH	1.243.545.500	756.795.110	98,85	1.243.545.500	756.795.110	60,85	1.025.814.000	597.283.545	58,23	0%	-18%	-9%	0%	-21%	-11%

Berdasarkan gambaran di atas terlihat secara umum tingkat capaian kinerja perangkat daerah baik sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun pada saat terpisah menjadi bagian keuangan dan bagian perlengkapan Setda Kota Cimahi, yang menjadi titik lemah pencapaian kinerja di sektor pengelolaan aset daerah pada tahun 2014 dan 2015 hanya berkisar antara 54-59% yang tertuang dalam satu kegiatan manajemen aset, hal ini disebabkan kewenangan pengelolaan aset pada saat menjadi bagian masih terbatas dan dukungan sumber daya manusia yang kurang, sehingga pada Tahun 2016 setelah terbentuk BPKAD terdapat beberapa perubahan yang dimulai dengan penambahan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas pengelolaan barang milik daerah, namun dikarenakan masih terdapat berbagai persoalan aset di masa lalu yang belum terinventarisasi secara utuh, menyebabkan beberapa pencapaian kegiatan tidak maksimal seperti pencapaian sertifikasi tanah hanya berkisar 10%-40% dari target hal ini disebabkan kurangnya kordinasi dengan BPN dikarenakan banyak fokus pekerjaan BPN Menyelesaikan target sertifikat gratis nasional, selain itu kesalahan penetapan target pada kegiatan penghapusan barang milik daerah sehingga kurang tepat

dalam mengukur hasil kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2016 seharusnya bukan per paket namun dijabarkan antara penghapusan dan penilaian.

Dalam sisi realisasi alokasi anggaran juga terlihat kegiatan manajemen aset yang mewakili salah satu pendukung kinerja pengelolaan aset tidak tercapai dengan baik, berbeda dengan aspek pengelolaan keuangan yang sudah tercapai dengan baik dimana semenjak tahun 2012 penetapan APBD selalu tepat waktu dan pelaporan keuangan selalu mendapat opini WTP, sehingga hal ini perlu untuk dipertahankan secara kinerja, namun dengan adanya sub bidang perencanaan aset yang menepel pada bidang anggaran, hal ini menjadikan satu tantangan untuk mensinergikan perencanaan aset dan perencanaan anggaran sehingga dibutuhkan kegiatan yang mendukung sinergi dua unsur tersebut.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi selama periode 2016-2017 serta pada saat terpisah sebagai bagian keuangan dan bagian perlengkapan selama periode 2012-2015 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.5 tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas dan penyempurnaan pada masa yang akan datang, antara lain :

- a) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;
- b) Masih terdapat kesulitan pencapaian target inventarisasi data aset seutuhnya dari sisi aspek legal pensertifikasian tanah serta pemilahan data extracountable barang yang tidak termasuk kelompok data aset tetap

BAB III

PERMASALAHAN Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada awalnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yaitu bagian keuangan dan bagian perlengkapan sebagaimana adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2015 yang meleburkan kedua bagian tersebut menjadi suatu Badan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kebijakan tersebut menentukan arah dari tata kelola keuangan dan aset daerah bagi keseluruhan SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Persoalan yang terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja di BPKAD eksiting diantaranya postur organisasi yang ramping dengan wewenang yang luas, sehingga bagian perencanaan aset masih tergabung kedalam bidang anggaran, hal ini menyebabkan beberapa penyelesaian pekerjaan yang kurang optimal, sedangkan bidang anggaran dalam porsi ideal perlu ditopang minimal dua sub bidang yaitu perencanaan dan pengendalian agar terdapat monitoring pencapaian anggaran terutama anggaran kas yang selama ini tertuang dalam kegiatan yang penyelesaiannya belum optimal
2. Persoalan yang terkait dengan prosedur operasional pelayanan di BPKAD eksiting diantaranya implementasi SOP pekerjaan BPKAD dan standar pelayanan belum optimal karena belum dilakukan evaluasi secara mendalam oleh bagian program BPKAD

3. Masih terdapat kesulitan pencapaian target inventarisasi data aset seutuhnya dari sisi aspek legal pensertifikasian tanah serta pemilahan data extracountable barang yang tidak termasuk kelompok data aset tetap

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru sesuai Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2017, maka Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu menyesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2017-2022 adalah “MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA” yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi

Adapun Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Terkait dengan misi, pengelolaan keuangan dan aset daerah tercakup ke dalam misi ke 2 (dua) yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang

amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi **Pertama**, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. **Kedua**, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; **Ketiga**, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintahan yang bersih (clean goverment), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dari tahun 2017-2022 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun kebelakang. Hal ini mengacu kepada apa yang telah dirasakan pada saat bagian keuangan dan bagian perlengkapan masih terpisah, yang menjadi dasar dalam menentukan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

No.	Kelemahan Faktor Internal	No.	Kekuatan Faktor Internal
1.	Inventarisasi Aset Daerah	1.	Perda Organisasi BPKAD

2.	Pengukuran Kinerja Organisasi	2.	Pemanfaatan Sistem Informasi
3.	Sertifikasi Keahlian Aparatur	3.	Sarana yang memadai

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi tahun ke depan dari mulai tahun 2017-2022.

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama terpisah antara bagian keuangan dan bagian perlengkapan serta akhirnya pengesahan SOTK yang baru menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka dari hal tersebut terdapat peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi untuk tahun 2016-2017, yaitu:

No	Peluang Faktor Eksternal	No.	Tantangan Faktor Eksternal
1.	Peran BPKAD yang strategis Sebagai Lembaga SKPKD Tingkat Esselon II	1.	Berkembangnya tuntutan stakeholder akan kemajuan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Reward atas kinerja keuangan dari Pemerintah Pusat	2.	Meningkatnya tuntutan stakeholder akan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Kemudahan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	3.	Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang

mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kota Cimahi, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan bisa optimal dicatat dan dialokasikan secara tertib, kemudian optimasi belanja daerah dapat dilakukan secara tepat serta kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu hingga pemanfaatan aset daerah dapat jelas berdaya guna terhindar dari idle asset yang tidak termanfaatkan secara baik oleh pengguna barang sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI

PLE

No.	Kekuatan (S)	No.	Peluang (O)
1.	Perda Organisasi BPKAD	1	Peran BPKAD yang strategis
2.	Pemanfaatan Sistem Informasi	2	Sebagai Lembaga SKPKD Tingkat
3.	Sarana yang memadai	3	Eselon II
			Reward atas kinerja keuangan
			dari Pemerintah Pusat
			Kemudahan koordinasi dengan
			pemerintah provinsi dan
			pemerintah pusat
No.	Kelemahan (W)	No.	Tantangan (T)
1.	Inventarisasi Aset Daerah	1	Berkembangnya tuntutan
			stakeholder akan kemajuan
			Akuntabilitas Pengelolaan
2.	Pengukuran Kinerja Organisasi		Barang Milik Daerah
		2	Meningkatnya tuntutan
			stakeholder akan Transparansi
3.	Sertifikasi Keahlian Aparatur		Pengelolaan Keuangan Daerah
		3	Perubahan Peraturan
			Perundang-undangan

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAPE)

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score (bobot x rating)	Prioritas
KEKUATAN					
1	Perda Organisasi BPKAD	20	4	80	I
2	Pemanfaatan Sistem Informasi	15	4	60	II
3	Sarana yang memadai	15	3	45	III
KELEMAHAN					
1	Inventarisasi Aset Daerah	25	4	100	I
2	Pengukuran Kinerja Organisasi	15	3	45	II
3	Sertifikasi Keahlian Aparatur	10	2	20	III
Jumlah		100		350	

Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya Perda Organisasi BPKAD yang ditetapkan oleh Walikota menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah inventarisasi aset daerah, prioritas kedua yang kuat adalah pemanfaatan sistem informasi sedangkan untuk kelemahannya adalah pengukuran kinerja Organisasi. Prioritas kekuatan ketiga adalah sarana yang memadai sedangkan sertifikasi keahlian aparatur menjadi kelemahan ketiga dalam meningkatkan kemampuan pegawai.

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score (bobot x Rating)	Prioritas
PELUANG					
1	Peran BPKAD yang strategis Sebagai Lembaga SKPKD Tingkat Esselon II	25	3	75	I
2	Reward atas kinerja keuangan dari Pemerintah Pusat	20	3	60	II
3	Kemudahan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	10	1	10	III
TANTANGAN					
1	Berkembangnya tuntutan stakeholder akan kemajuan Akuntabilitas Pengelolaan	20	3	60	I

	Barang Milik Daerah				
2	Meningkatnya tuntutan stakeholder akan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	10	2	20	III
3	Perubahan Peraturan Perundang-undangan	15	3	45	II
Jumlah		100		270	

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah peran BPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah , prioritas kedua dalam peluang adalah adanya reward atas kinerja keuangan dari pemerintah pusat namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah dan prioritas yang ketiga adalah kemudahan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Perubahan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

KAFI	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
------	--------------	---------------

KAFE	1. Perda Organisasi BPKAD. 2. Pemanfaatan Sistem Informasi. 3. Sarana yang memadai.	1. Inventarisasi Aset Daerah; 2. Pengukuran Kinerja organisasi. 3. Sertifikasi Keahlian Sumber Daya Aparatur.
Peluang (O)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
1. Peran BPKAD yang Strategis; 2. Reward atas kinerja keuangan daerah dari pemerintah pusat; 3. Kemudahan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.	1. Melalui Perda BPKAD dibutuhkan optimasi peningkatan pelayanan yang prima ke stakeholder terkait 2. Melalui sistem informasi perlu adanya Peningkatan ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Pemda. 3. Dengan sarana yang memadai dapat mendukung kerjasama dengan pihak kementerian dalam proses transfer knowledge	1. Peran BPKAD yang strategis diperlukan untuk Menginisiasi penyusunan Perwal dan SOP Barang Milik Daerah 2. Melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait agar kinerja BPKAD lebih meningkat. 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya melalui program sertifikasi keahlian dengan lembaga maupun kementerian terkait.
Tantangan (T)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
1. Berkembangnya Tuntutan Stakeholder akan kemajuan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Meningkatnya tuntutan	1. Dengan Peran BPKAD yang tertuang dalam Perda Organisasi maka dapat dilakukan Rekonsiliasi Bersama Pengurus Barang di perangkat daerah secara rutin pada tahun berjalan. 2. Memanfaatkan sistem informasi untuk	1. Menjalin kerjasama dengan tenaga ahli maupun berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam upaya <i>transfer knowledge</i> inventarisasi aset daerah 2. Permohonan bantuan untuk

Stakeholder akan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah ; 3. Perubahan Peraturan Perundang- undangan.	Mengembangkan aplikasi keuangan dan aset daerah yang mendukung data <i>real time</i> yang tepat dan akurat; 3. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pejabat dan pengelola keuangan sesuai SOTK terbaru.	implementasi pengukuran kinerja kepada inspektorat dan bagian organisasi. 3. Pengiriman aparatur keuangan daerah untuk mempelajari dan memahami peraturan perundangan terbaru.
--	--	---

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Factors Success*) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

FORMULASI TUJUAN

FKK (CFS)	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
MISI	1. Perumusan kebijakan teknis keuangan daerah. 2. Monitoring dan evaluasi pelayanan produk keuangan kepada stakeholder. 3. Tersedianya aplikasi keuangan dan aset yang telah terintegrasi. 4. Tingkat keberhasilan inventarisasi aset daerah yang efektif dan efisien. 5. Tingkat pemanfaatan barang milik daerah 6. Tersedianya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah. 7. Tingkat kemampuan kapasitas aparatur BPKAD. 8. Tingkat keberhasilan pengukuran kinerja organisasi BPKAD yang tepat.
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.	TUJUAN: 1. Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah.

Berdasarkan gambaran hasil analisa SWOT dan CFS maka mengerucut kedalam isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh BPKAD mengenai **belum optimalnya tata kelola keuangan daerah**, dengan beberapa faktor kunci yang

mendukung isu tersebut dapat diselesaikan apabila monitoring dan evaluasi pelayanan produk keuangan kepada stakeholder dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan, serta didukung oleh aplikasi keuangan dan aset daerah yang telah terintegrasi dengan memilih metode inventarisasi aset daerah yang efektif dan efisien, dan hal tersebut perlu disampaikan kepada stakeholder melalui media sosialisai maupun bimbingan teknis yang tentunya bisa menggunakan narasumber yang ahli maupun oleh aparatur keuangan yang telah ditingkatkan kapasitas kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga atas semua pekerjaan yang dilakukan oleh BPKAD harus dilaporkan secara jelas dan terukur tingkat keberhasilannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses *learning by doing* untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik . Tujuan Strategik tersebut yaitu Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, yang dapat terukur melalui tingkat keberhasilan mencapai :

1. Penetapan APBD secara tepat waktu;
2. Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Daerah.

N	TUJUAN	SASARA	INDIKATOR	TARGET	KINERJA
---	--------	--------	-----------	--------	---------

o		N	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
1	Teroptimalisasi kualitas tata kelola keuangan daerah	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Prosentase Laporan Perangkat Daerah sesuai SAP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Rasio Utilisasi Aset	40%	40%	50%	60%	70%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.6. Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan pemanfaatan sistem informasi dan sarana yang memadai.

Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya inventarisasi aset daerah dan sertifikasi SDM aparatur yang masih dibawah komposisi standar. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan aset serta transparansi pengelolaan keuangan daerah hingga implementasi peraturan pemerintah terbaru.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan yaitu ***“Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan barang milik daerah”***.

4.7. Kebijakan

Kebijakan, mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:

VISI : MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA
MISI : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem

penganggaran yang pro publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
			Pengendalian Anggaran
			Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah
			Penatausahaan Barang Milik Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Cimahi

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan tujuan organisasi.

1. Program peningkatan pengelolaan dan pengembangan keuangan daerah

Pola pengelolaan keuangan daerah yang efisien merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dasar analisis tata kelola keuangan daerah.

1.1 Penyusunan Standar Satuan Harga

Sifat dan tujuan kegiatan ini untuk menetapkan satuan harga tertinggi dalam mendukung penyusunan belanja daerah, dengan indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen standar satuan harga dan terlaksananya sosialisasi regulasi keuangan daerah.

1.2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;

Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib setiap tahun anggaran terkait penerbitan buku mengenai perencanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen peraturan daerah Kota Cimahi tentang APBD.

1.4 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah Tersusunnya dokumen peraturan kdh Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD.

1.5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa penyesuaian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen peraturan kdh Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD

1.6 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah Tersusunnya dokumen peraturan kdh Kota Cimahi tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.7 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta dalam kegiatan ini akan lahir laporan keuangan pemerintah kota yang menjadi dasar pemberian opini oleh BPK. Indikator hasil yang diharapkan Terbitnya Dokumen peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD dan Terbitnya dokumen laporan keuangan 2017 serta laporan semester 2018.

1.8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah Terbitnya Peraturan kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD.

1.9 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah;

Kegiatan ini mengarah kepada penyusunan aplikasi hibah bansos sesuai arahan KPK sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan hibah dan bansos di Kota Cimahi. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terbitnya satu Kajian Keuangan Daerah dan Terbitnya satu Media Interaktif.

1.10 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

Kegiatan ini mengarah kepada aplikasi yang digunakan oleh pemerintah kota cimahi dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya sistem informasi berbasis standar akuntansi, Terlaksananya integrasi SIPKD dan SIMRENDANA serta terlaksananya pelatihan SIPKD untuk PPK dan Operator.

1.11 *Peningkatan Manajemen Aset / Barang daerah*

Kegiatan ini mengarah pada pengembangan aplikasi aset Pemerintah Kota Cimahi. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Pengembangan sistem aplikasi aset.

1.13. *Pengendalian Anggaran*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya keselarasan antara anggaran kas dan SPD yang telah diberikan oleh BPKAD selaku BUD kepada SKPD. Adapun indikator kegiatan ini adalah Terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) per triwulan untuk seluruh perangkat daerah Dokumen; Terbitnya Laporan Keselarasan anggaran kas dan realisasi secara periodik.

1.14. *Sinergisitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya tersedianya rekapitulasi laporan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi jawa barat. Adapun indikator kegiatan ini Tersusunya dokumen dan pelaporan bantuan keuangan kota cimahi satu Dokumen , Terlaksananya rekonsiliasi penerima bantuan provinsi.

1.15. Penghapusan Barang Milik Daerah

Maksud Kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian dan penghapusan pada barang milik daerah pemerintah kota cimahi. Adapun indikator kegiatan ini Realisasi Penghapusan BMD dari Perangkat Daerah 70%.

1.17. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Maksud Kegiatan ini adalah tersedianya data aset yang bisa dimanfaatkan apabila aset tersebut dalam keadaan menganggur. Adapun indikator kegiatan ini Terwujudnya sumber pendapatan baru dan identifikasi pengalihan kekayaan daerah

1.18. Optimasi Aset Daerah

Maksud Kegiatan ini adalah tersusunya kajian penilaian atas aset milik pemerintah yang belum masuk kepada neraca. Adapun indikator kegiatan ini Tersusunnya dokumen penilaian aset daerah.

1.19. Peningkatan Pelayanan Penatausahaan dan Perbendaharaan

Maksud Kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan penerbitan SP2D bagi SKPD dan pihak ketiga. Adapun indikator kegiatan ini Penyediaan pelayanan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada APBD Kota Cimahi TA 2018 ,Terlaksananya integrasi SIM Gaji dan SIM Pegawai ASN Kota Cimahi.

2. Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Miliik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah

2.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;

Kegiatan ini merupakan dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun kebutuhan barang di lingkungannya tersendiri dengan pedoman yang disusun

oleh BPKAD. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen rkbmd yang dihasilkan.

2.2 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem RKBMD;

Kegiatan ini merupakan pengembangan aplikasi pendukung penyusunan RKBMD di seluruh perangkat daerah agar memudahkan BPKAD dan para pengguna dalam menyusun RKBMD. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah modul aplikasi yang dihasilkan.

2.3 Penilaian Aset Daerah;

Kegiatan ini merupakan penilaian aset atas kepemilikan aset kota yang belum tercantum di laporan neraca daerah. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah unit aset yang dinilai.

2.4 Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;

Kegiatan ini merupakan penyusunan dokumen rutin pendukung RKBMD yaitu standar satuan harga, standar barang dan standar kebutuhan barang milik daerah. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.5 Penyusunan Pedoman Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Kegiatan ini merupakan penyusunan dokumen kebijakan umum penyusunan APBD setiap tahunnya. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen pedoman APBD.

2.6 Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan rangkaian proses pengumpulan data RKA-SKPD dan RKPA-SKPD hingga asistensi atas RKA yang disusun, dengan disisipi beberapa pelatihan mengenai teknik menyusun RKA yang baik dan benar. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.7 Penyusunan Kajian dan Identifikasi Sumber Dana APBD

Kegiatan ini merupakan penyusunan atas kajian mengenai sumber dana APBD yang berfungsi untuk dasar analisa alokasi penganggaran berdasarkan sumber dana. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen;

2.8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang APBD

Kegiatan ini merupakan penyusunan dokumen rutin dan wajib disusun mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota murni serta perubahan. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen;

2.9 Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang APBD

Kegiatan ini merupakan penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang APBD murni dan perubahan. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen;

2.10 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan rangkaian proses pengumpulan data DPA-SKPD & DPPA-SKPD hingga asistensi atas DPA yang disusun. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.11 Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Kas Daerah

Kegiatan ini merupakan rekonsiliasi bersama perangkat daerah atas penyerapan anggaran kas yang sudah direncanakan sesuai Surat penyediaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monev perangkat daerah.

2.12 Fasilitasi Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan rekapitulasi bantuan keuangan provinsi beserta asistensi penerima bantuan keuangan provinsi. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.13 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan pengembangan aplikasi keuangan daerah beserta pelatihan untuk masing-masing perangkat daerah sehingga dapat lebih

kompeten dalam menggunakan aplikasi SIPKD. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah modul aplikasi.

2.14 Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan ini merupakan penyusunan dokumen peraturan daerah dan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban dokumen APBD. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.15 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini merupakan penyusunan dokumen laporan keuangan semester I dan laporan keuangan pemerintah kota beserta pelatihan atas teknik-teknik dalam menyusun laporan keuangan pada perangkat daerah. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.16 Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Kegiatan ini merupakan penyusunan dokumen kebijakan akuntansi di lingkungan pemerintah kota. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.17 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Kegiatan ini merupakan rekonsiliasi atas aktivitas penerimaan dan pengeluaran perangkat daerah dari seluruh sumber dana sehingga terjalin sinergi. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen

2.18 Pemutakhiran database gaji pnsd

Kegiatan ini merupakan update dan pemeliharaan data gaji pnsd. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah pegawai.

2.19 Penghapusan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini merupakan proses penilaian hingga penghapusan barang milik daerah di lingkungan kota cimahi. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini merupakan proses penelusuran aset idle yang terdapat di neraca kota untuk dijadikan potensi pemanfaatan aset yang dapat menghasilkan

pendapatan asli daerah. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.21 Inventarisasi Barang Milik Daerah

Kegiatan ini merupakan proses penelusuran data aset kota sehingga menghasilkan laporan posisi aset milik pemerintah kota dalam penguasaan maupun tidak dalam penguasaan beserta aset-aset idle yang tercantum di neraca. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.22 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah

Kegiatan ini merupakan pengembangan atas aplikasi barang milik daerah beserta pelatihan untuk para pengurus barang di perangkat daerah. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah modul aplikasi.

2.23 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah

Kegiatan ini merupakan rekonsiliasi bersama para pengurus barang atas laporan inventarisasi yang mereka susun sehingga tercipta sinergi. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen monev.

2.24 Pengamanan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini merupakan proses pensertifikatkan tanah serta pemasangan patok dan plang atas aset milik kota yang dalam penguasaan kota. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah unit aset.

2.25 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Aset Daerah

Kegiatan ini merupakan pembelian sarana pendukung kegiatan penyimpanan barang milik daerah seperti pembelian gudang penyimpanan maupun bangunan yang dimaksudkan untuk mengamankan barang milik daerah yang disiapkan untuk dinilai dan dihapuskan ataupun yang belum dialokasikan kepada perangkat daerah.

2.26 Penyusunan Produk Hukum Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan proses penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah beserta produk peraturan walikota maupun

peraturan daerah terkait keuangan daerah. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.27 Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan sosialisasi atas produk-produk keuangan daerah dari level pusat hingga daerah yang terkait pengelolaan keuangan daerah. Adapun hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.28 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Hibah dan Bansos

Kegiatan ini merupakan pengembangan aplikasi hibah dan bansos beserta sosialisasi atas pengelolaan hibah dan bansos berbasis aplikasi. Adapun hasil kegiatan ini adalah jumlah modul aplikasi.

3. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pendukung kegiatan BPKAD. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

3.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan pendukung layanan komunikasi dan internet sebagai penunjang aktivitas operasional kantor.

3.2 Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional/dinas;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.

3.3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengamanan asuransi pada kendaraan dinas di lingkungan BPKAD.

3.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan.

3.5 Penyediaan alat tulis kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

3.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

3.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan.

3.8 Penyediaan bahan logistik kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan logistik natura dan rumah tangga di lingkungan BPKAD.

3.9 Penyediaan Makan dan Minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD Badan Pengelolaan keuangan Daerah.

3.10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

3.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Bentuk kegiatan ini mengarah pada tenaga harian lepas yang diperbantukan untuk membantu operasional kegiatan yang mendukung jalannya aktivitas kantor.

4. Program peningkatan sarana prasarana aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrai perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

4.1 Pengadaan Kendaraan Operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan BPKAD Kota Cimahi

4.2 Pengadaan Meubeler;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan mebeuler sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

4.3 Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya ketertiban dokumentasi arsip keuangan dan aset daerah dalam tempat yang aman.

4.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan audio visual yang membantu dalam aktivitas pekerjaan rutin di lingkungan kantor BPKAD Kota Cimahi.

4.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan BBM dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas BPKAD Kota Cimahi.

4.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya pemeliharaan gedung dan alat pada gedung perkantoran BPKAD Kota Cimahi.

4.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya meja dan kursi kantor serta alat meubeuler yang terkait dengan aktivitas kantor sesuai dengan umur ekonomisnya.

4.8 Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang terkait dengan aktivitas kantor sesuai dengan umur ekonomisnya.

4.9 Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan ATK.

4.10 Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah bulan jasa komunikasi, jasa listrik, dan jasa air

4.11 Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan media informasi, serta jumlah bulan penggandaan.

4.14 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah pengadaan kendaraan, kendaraan yang dipelihara, serta kendaraan asuransi yang dibayar

4.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Meubelair Kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah meja, kursi, lemari, serta set partisi.

4.16 Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah unit komputer, unit printer, unit server, serta unit ac.

4.17 Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah bulan jasa kebersihan kantor

4.18 Penyediaan gudang kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah gudang.

4.19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah set peralatan rumah tangga.

4.20 Penataan Arsip Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah arsip aktif dan inaktif.

4.21 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah bulan THL yang diasuransikan.

4.22 Pengadaan Seragam Pegawai;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah set seragam pegawai.

4.23 Penyediaan makanan dan minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.

4.24 Koordinasi dan konsultasi kedinasan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah perjalanan dinas.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah mendukung kapasitas aparatur pegawai. Kegiatan dari program ini terdiri dari :

5.1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kapabilitas aparatur pengelola keuangan

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Arahan kebijakan dari program ini adalah mendukung pelaporan LAKIP dan penyerapan anggaran di perangkat daerah, maka indikator dari program ini yaitu LAKIP dan % capaian penyerapan anggaran. Kegiatan dari program ini terdiri dari :

6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya ketertiban penataan administrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelayanan hingga pelaporan dalam kerangka dasar berupa kebijakan dan laporan yang dapat mewujudkan peningkatan kinerja BPKAD;

6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan keuangan periode semester yang akuntabel dan transparan.

6.3 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun;

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun anggaran yang menggambarkan prinsip akuntansi pengelolaan APBD oleh SKPD selama satu tahun anggaran.

6.4 Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan.

Kegiatan ini mengarah pada peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur BPKAD dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

6.5 Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan LKIP dan LPPD PD;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen moneyv, dokumen LPPD, dan dokumen LKIP

6.6 Penyusunan Standar Pelayanan Operasional dan Prosedur PD;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah SOP.

6.7 Penyusunan Renstra dan Renja PD;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen renstra dan renja.

6.8 Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen anggaran.

6.9 Penyusunan Laporan Keuangan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan.

6.10 Penyusunan Laporan Inventaris Barang;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan inventaris barang.

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

Arahan kebijakan dari program ini adalah peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pembangunan. Kegiatan dari program ini terdiri dari :

7.1. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah ASN yang dibina dan yang terlatih

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategik SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi 2017-2022 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kota Cimahi. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Rencana strategik yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari.

Cimahi,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI,

Dra. Hella Haerani

NIP. 19660214 199202 2 001

